

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran sebelum bekerja asal Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum sebelum bekerja terhadap pekerja migran asal Kota Padang mampu memberikan perlindungan sebagaimana tujuan utama untuk mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan perlindungan hukum sebelum bekerja terhadap pekerja migran asal Kota Padang dilaksanakan melalui rangkaian tahapan yang dilalui oleh si pekerja migran tersebut, mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga perjanjian penempatan. proses yang saling terkait satu sama lain sehingga setiap sisi memiliki perannya tersendiri dalam mengawasi, memastikan, dan menjamin hak-hak pekerja migran asal Kota Padang. Selain itu, tantangan utama pada saat pelaksanaan hanya dari intervensi luar bukan dari sistem yang dijalankan itu sendiri, seperti penggunaan anggaran khusus yang tidak tepat sasaran, agen penempatan ilegal, dan budaya merantau melalui kerabat.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum sebelum bekerja terhadap pekerja migran asal Kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan ini terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu perlindungan administratif dan perlindungan teknis. Secara administratif, perlindungan hukum terhadap calon pekerja migran asal Kota Padang diwujudkan melalui pemenuhan seluruh dokumen dan persyaratan yang sah, seperti paspor, visa kerja,

perjanjian kerja (PK), perjanjian penempatan (PP), serta kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kelengkapan dan keabsahan dokumen ini menjadi bentuk perlindungan dasar untuk menjamin legalitas dan kejelasan status calon pekerja migran Kota Padang sebelum berangkat ke luar negeri. Sementara itu, perlindungan teknis dilakukan melalui berbagai kegiatan edukatif dan pemberdayaan, antara lain sosialisasi mengenai prosedur penempatan yang aman dan risiko penempatan ilegal, serta pembekalan terkait hak dan kewajiban pekerja di negara tujuan. Perlindungan teknis ini juga mencakup fasilitasi pemenuhan hak-hak calon pekerja migran melalui pendampingan administratif dan penegasan isi perjanjian kerja agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pihak pemberi kerja. Selain itu, peran pegawai fungsional pengantar kerja di BP3MI dan Dinas Tenaga Kerja turut memperkuat proses perlindungan dengan memastikan bahwa seluruh tahapan penempatan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku serta memberikan bimbingan bagi calon pekerja migran agar siap secara administratif, teknis, dan mental sebelum di berangkatkan ke luar negeri.

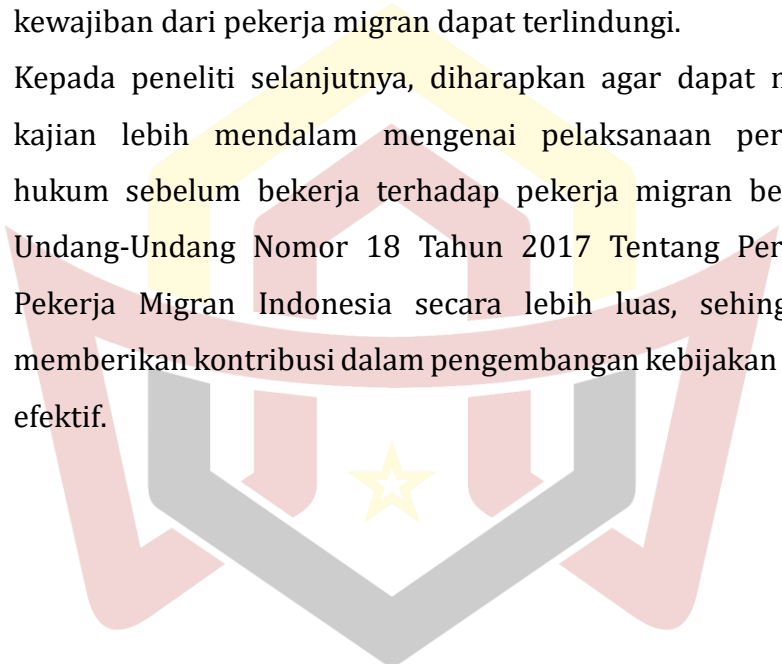
5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan berdasarkan kesimpulan yang telah di paparkan di atas sebagai berikut:

1. Kepada BP3MI Sumatra Barat dan P3MI agar terus meningkatkan kualitas pelayanan penempatan, baik dari segi efetifitas maupun dari segi fasilitas dan sarana pendukung lainnya. Selain itu, penting juga untuk selalu konsisten menyebarluaskan informasi tentang pekerja migran melalui sosialisasi ataupun media lainnya.
2. Kepada Pemerintah daerah disarankan agar lebih aktif mendukung program pekerja migran dengan menyediakan anggaran khusus, serta menjalin koordinasi dengan instansi lain seperti dinas

ketenagakerjaan dan Stockholder lainnya untuk memperkuat program perlindungan pekerja migran secara efektif.

3. Kepada masyarakat disarankan untuk meningkatkan pemahaman bahwa bekerja diluar negri itu ada prosesnya, untuk memastikan perlindungan dari pekerja migran tersebut. Oleh karena itu, stigma negatif terhadap proses lama dan susah sehingga memilih cara instan untuk bekerja keluar negri dihilangkan supaya hak dan kewajiban dari pekerja migran dapat terlindungi.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat melakukan kajian lebih mendalam mengenai pelaksanaan perlindungan hukum sebelum bekerja terhadap pekerja migran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara lebih luas, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, Hani. 2020. *Kewajiban Negara Melindungi Pekerja Migran Indonesia*. Hukumonline.com. Diakses tanggal 4 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-negara-melindungi-pekerja-migran-indonesia-lt5fc5c313249e6/?page=1>
- Affan, Ibnu. 2018. *Eksekusi Putusan Perkara Pphi (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Rekonstruksi Polikik Hukum Berbasis Hukum Progresif*. Medan: Perdana Publishing.
- Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indoneisa: Dinamika dan Kajian Teori*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Andriani, Novi. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". *Skripsi*. Universitas Islam Negri Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Angelica Zefanya Akay, Imelda A. Tangkere, Feiby S. Wewengkang. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022". *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13 (4): 1-10.
- ANTARA. 2024. *Apa Itu Pekerja Migran Indonesia*. Antaranews.com. Diakses tanggal 05 Januari 2026. <https://www.antaranews.com/berita/4412837/apa-itu-pekerja-migran-indonesia>
- ANTARASUMBAR. 2023. *Polda Sumbar Ungkap 11 Kasus TPPO Dan Tangkap 12 Tersangka*. Antaranews.com. Diakses tanggal 04 Januari 2026. <https://sumbar.antaranews.com/berita/571170/polda-sumbar-ungkap-11-kasus-tpo-dan-tangkap-12-tersangka>
- arianto, Dudi. 2021. *Strategi Perlindungan Hukum Pekerja Migran Internasional*. Jakarta: Kencana.
- ASEAN. 2017. *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Done in Manila, the Philippines on 14 November 2017. ASEAN Secretariat. Diakses tanggal 9 Oktober 2025. <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/02/2017-ASEAN-Consensus-on-the-Protection-and-Promotion-of-the-Rights-of-Migrant-Workers-2.pdf>
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2025. *Data 06-02-2025 Laporan Tahunan Publikasi Data PMI 2024*. BP2MI.go.id. Diakses tanggal 2 Januari 2026. <https://id.scribd.com/document/848243541/Data-06-02-2025-Laporan-Tahunan-Publikasi-Data-PMI-2024>
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2024. *Kepala BP2MI: Gaji pekerja migran Indonesia hingga 44 juta*. BP2MI.go.id. Diakses tanggal 2 Januari 2026. <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/kepala-bp2mi-gaji-pekerja-migran-indonesia-hingga-44-juta>

- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 2025. *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari - Desember 2024*. BP2MI.go.id. Diakses tanggal 20 Maret 2025. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-desember-2024>
- Badan Pusat Statistik. 2025. *Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 Turun Menjadi 8,47 Persen*. bps.go.id. Diakses tanggal 2 Januari 2026. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>
- Badan Pusat Statistik. 2025. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,85 Persen*. bps.go.id. Diakses tanggal 2 Januari 2026. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/2479/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-85-persen--rata-rata-upah-bur>
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. 2025. *Kota Padang Dalam Angka*. bps.go.id. Diakses tanggal 26 Agustus 2025. <https://padangkota.bps.go.id/id/kota-padang-dalam-angka-2025.html>
- Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat. 2025. *Sejarah BP3MI Jawa Barat*. jabar.bp2mi.go.id. Diakses tanggal 6 November 2025. <https://jabar.bp2mi.go.id/sejarah-bp3mi-jawa-barat>
- Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatra Barat. 2021. *Struktur Organisasi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Wilayah Sumatra Barat*. sumbar.bp2mi.go.id. Diakses Tanggal 6 November 2025. <https://sumbar.bp2mi.go.id/sog>
- Creswell, Jhon W., and J. David Creswell. 2018. *Research Design*. New Delhi: SAGE.
- Daeng, Mohd. Yusuf. 2018. *Sosiologi Hukum*. Pekanbaru: Alif Riau.
- Darojatun. 2025. *Kemensos Dampingi 569 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Myanmar*. Kemensos. Diakses tanggal 3 Januari 2026. <https://kemensos.go.id/index.php/berita-terkini/direktorat-jenderal-rehabilitasi-sosial/Kemensos-Dampingi-569-Pekerja-Migran-Korban-Perdagangan-Orang-di-Myanmar>
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, Kartika. 2019. *Migrasi Tenaga Kerja Indonesia: Dinamika Dan Tantangan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Rajawali Pers.
- Hamid, Adnan. 2019. *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran (Tinjauan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Handayani, Tri Astuti. 2016. "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap perempuan". *Jurnal Rechtsstaat Nieuw* 1 (1). 18-29.

- Isnaeni, Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Kataboks Katadata. 2025. *Profesi Pekerja Migran Indonesia Kuartal I 2025, Mayoritas PRT*. kataboks.katadata.co.id. Diakses tanggal 2 Januari 2026. <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/6811b69aeb6aa/profesi-pekerja-migran-indonesia-kuartal-i-2025-mayorita>
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)*. kbbi.web.id. Diakses tanggal 22 Mei 2025. <https://kbbi.web.id/tinjauan>
- Keputusan Menteri Nomor 10/MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-1-4A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Khafid, Sirojul. 2025. *Tujuh dari Sepuluh Orang Indonesia Tidak Menabung*. harianjogja.com. Diakses tanggal 26 Januari 2026. <https://ekbis.harianjogja.com/read/2025/01/02/502/1199597/tujuh-dari-sepuluh-orang-indonesia-tidak-menabung>
- Komnas Ham. 2023. *Situasi HAM Di Indonesia Periode Semester 1 2023*. komnasham.go.id. Diakses tanggal 3 Januari 2026. <https://www.komnasham.go.id/files/20230925-situasi-ham-di-indonesia-periode-SSJ4ZCG.pdf>
- Mahendra, Rizky Adha. 2025. *Ratusan Calon Pekerja Migran Ilegal Dicegah di Soetta, 39 Tersangka Dijerat*. detikNews. Diakses tanggal 3 Januari 2026. <https://news.detik.com/berita/d-8152455/ratusan-calon-pekerja-migran-ilegal-dicegah-di-soetta-39-tersangka-dijerat>
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miles, Matthew. Michael Huberman. Jhonny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. London: SAGE
- Mulyani, F. 2022. "Sosial Budaya Di Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2016-2020". *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1(2): 326-334.
- Ningsih, Suria. 2011. *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: Usu Press.
- Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran.

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan PMI
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Philipus, M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Porta, Rafael La. 1999. "Investor Protection and Corporate Governance". *Journal of Financial Economics* 58 (1-2): 3-27.
- Prasetio, Indrianto. 2022. Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.
- Pratama, Andi. 2019. "Problematisasi Perlindungan Hukum Pekerja Migran". *Jurnal Hukum Dan Ham* 12 (1): 23-40.
- PT. Wibawa Mandaputra. 2022. *Alasan Seseorang Menjadi Buruh Migran*. dutawibawa.com. Diakses tanggal 22 Mei 2025. <https://dutawibawa.com/news-alasan-seseorang-menjadi-buruh-migran-124>
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahayu, Devi. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*. Yogyakarta: New Elmatara.
- Rahayu, Sri. 2021. *Analisis Yuridis UU PPMI: Implementasi Dan Tantangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjidi, Lili. I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Pemaja Rosdakarya
- Rosida, Nina. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1 (1): 95-104.
- Saisap, Melisa Goreti Tiara, Caecilia J. J. Waha, and Imelda A. Tangkere. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 15 (3): 1-12.
- Sasongko, Whyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Serikat Buruh Migran Indonesia. 2025. *SBMI Tegaskan Hak Buruh Migran Harus Menjadi Pusat dari Kebijakan Bukan Catatan Pinggir dalam Diskusi RANHAM Generasi Ke-VI*. sbmi.or.id. Diakses tanggal 3 Januari 2026.

<https://sbmi.or.id/sbmi-tegaskan-hak-buruh-migran-harus-menjadi-pusat-dari-kebijakan-bukan-catatan-pinggir-dalam-diskusi-ranham-generasi-ke-vi/>

- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subhan, Hadi. 2012. *Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, dan Purna Penempatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukamdi, Haris, Abdul, Brownlee, Patrick. 2000. *Labor Migration in Indonesia: Population Study Center*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Waluyono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo, Hartono. Jossi Belgradoputra. 2019. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". *Jurnal Binamulia Hukum* 8 (1): 107-116.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Wibowo, Hendra. 2020. " Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Pekerja Migran". *Jurnal Kajian Sosial Dan Politik* 6 (3): 78-95.
- Yuliana, E. Yuliana. 2019. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia (Studi Di P4tki Malang). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.

UIN IMAM BONJOL
PADANG